

**KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPENGARUHI
BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG, BELANJA HIBAH, DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL**

(Studi pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012)

Oleh :

Ardyan Firdausi Mustoffa

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email : ardyanfirdausi@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the factors that affect of the characteristics of the government local personnel expenditures, goods expenditures, grant expenditures and social assistance expenditures in LKPD in Financial Report of Local Government 2012 in Central Java. The data used in this research is secondary data, namely the Local Government Finance Report in 2012 which has been audited by the Badan Pengawasan Keuangan Audit Report CPC in 35 districts / cities in Central Java province which was taken from the official website of the CPC. The analysis technique used in this research is the analysis of financial ratios and sample selection using purposive sampling method.

The results of this study indicate that the variable size individually significant effect on personnel expenses. Variable independence ratio, the size of the board, the Human Development Index (HDI) and the status of individual regions no significant effect on personnel expenses. Variable size individually affect the expenditures goods. Variable independence ratio, the size of the board, the Human Development Index (HDI) and the status of the individual areas are not significant to the expenditures goods. Variable Ratio independence of the Human Development Index (HDI), Legislative Size, Size and Status individually not significant effect on grant expenditures. Status variable regions individually significant effect on social assistance expenditure ratio Independence Human Development Index, and the Legislative Size individually not significant effect on social assistance spending.

Keywords: Board Size, Size, Human Development Index (HDI), ratio of Independence, Regional Status, personnel expenditures, expenditures Goods, Grant Expenditures, and Expenditures Social Assistance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Kebijakan tersebut dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2005).

Fenomena belanja pegawai juga terdapat pada kasus pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Pemekaran daerah seharusnya fokus terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak menambah inefisiensi biaya birokrasi lokal. Pada prakteknya, pemekaran daerah menambah pengeluaran pada daerah otonom baru terutama alokasi belanja pegawai yang bersumber dari dana perimbangan. Hal tersebut dikarenakan belum terciptanya stabilitas keuangan pada daerah pemekaran berupa PAD dan SILPA. Seperti yang diungkapkan oleh Anggota Komisi C DPRD Jateng, Al Fasadun, saat ekspose interaktif DPRD Jateng di Gedung Berlian, Senin (8/4/2013) mengungkapkan bahwasejak tahun 2012 sampai sekarang anggaran untuk pegawai meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar 60 persen sedangkan sisanya 40 persen untuk belanja langsung. Dalam pertemuan dengan para gubernur Selasa pagi (4/11/2014), Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah menekan rasio belanja pegawai di APBD melalui efisiensi. Rata-rata rasio belanja pegawai yang mencapai 80% dari total dana alokasi umum, menurut Presiden, membuat program pembangunan di

daerah tidak efektif. (www.tribunnews.com)

Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras anggarannya untuk membiayai belanja pegawai antara lain disebabkan oleh: *Pertama*, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta adanya gaji ke-13. *Kedua*, pembiaran terjadinya rekrutmen PNS secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. *Ketiga*, jumlah organisasi yang ada di kabupaten/kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah (Prayitno, 2012).

Pengelolaan APBD yang tepat untuk alokasi belanja pegawai menjadi sangat penting. UU No. 33/2004 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan yang terdiri Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah Daerah dituntut melakukan penganggaran alokasi belanja pegawai dan belanja modal yang berorientasi terhadap input, output, dan outcome. Penganggaran biaya yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Namun, fenomena penganggaran biaya pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah ditemukan *Gap* pada alokasi belanja pegawai dan belanja modal, dimana persentase belanja pegawai sebesar 60% dan belanja modal sebesar 30%. Kesenjangan ini tentunya berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan, dimana idealnya belanja modal seharusnya lebih besar dari belanja pegawai karena belanja modal secara langsung digunakan untuk kepentingan publik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah Ukuran Dewan, Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian dan *Human Development Index (HDI)* mempengaruhi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012?

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut: (i) Variabel Independen yang diteliti adalah ukuran dewan, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan *Human Development Index (HDI)*; (ii) Variabel Dependen yang diteliti adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. (iii) Objek Penelitian yang digunakan adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2012.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah. Instrumen utama yang digunakan dalam mengelola keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lebih jauh dalam PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penerimaan dan belanja yang dianggarkan dalam APBD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah. Penyusunan program sendiri diarahkan dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua belanja dapat dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Belanja Langsung terdiri dari:

Belanja pegawai sebagai belanja yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya gaji yang bersifat rutin. Belanja pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai dalam APBD dijabarkan menjadi 2 kategori yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk menganggarkan gaji dan honorarium rutin yang sifatnya tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, sedangkan belanja langsung digunakan untuk menganggarkan honorarium yang langsung terkait kegiatan. Dalam pertanggungjawabannya di laporan keuangan, SAP tidak mensyaratkan pemisahan kategori belanja langsung dan tidak langsung, sehingga belanja

langsung dan tidak langsung disajikan sebagai satu kesatuan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa umumnya dianggarkan untuk membiayai operasional dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah seperti belanja untuk alat tulis Kantor, perjalanan dinas pegawai, dan pemeliharaan aset.

Belanja hibah merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan sebelumnya. Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa Pemberian hibah dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Kriteria pemberian bantuan sosial adalah diberikan berupa uang/barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

Karakteristik Daerah

Karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Lesmana (2010) mengatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat menggambarkan karakteristik Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan merupakan suatu alat yang memfasilitasi transparansi akuntabilitas publik, yang menyediakan informasi yang relevan mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos yang ada dalam laporan keuangan tersebut.

Ukuran Legislatif (ULEG)

DPRD sebagai badan legislatif mempunyai fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah agar Pemerintah Daerah dapat mengelola anggaran yang ada untuk dapat di dayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Giligan dan Matsusaka (2001) memproksikan ukuran legislatif dengan jumlah anggota Badan Legislatif yang ada di Pemerintah Daerah di Amerika Serikat. Sumarjo (2010) juga menggunakan proksi jumlah anggota DPRD untuk mengukur ukuran legislatif. Berdasarkan penelitian Giligan dan Matsusaka (2001) dan Sumarjo (2010), maka dalam penelitian ini juga menggunakan jumlah anggota DPRD sebagai proksi untuk mengukur ukuran legislatif.

Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)

Untuk mengukur ukuran suatu organisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti jumlah pegawai,

total aset, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991). Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan $\log total\ revenue$ sebagai proksi untuk mengukur ukuran Pemerintah Daerah. Baber (2010) menggunakan populasi penduduk sebagai proksi dari *size*. Sumarjo (2010) dan Lesmana (2010) menggunakan total aset Pemerintah daerah sebagai proksi untuk variabel ukuran Pemerintah Daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh. Nilai aset juga dianggap lebih stabil daripada nilai total penjualan (Wuryaningsih, 2002 dalam Sumarjo, 2010).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) dan Lesmana (2010), peneliti menggunakan total aset sebagai proksi untuk mengukur ukuran Pemerintah Daerah. Data seperti total aset memiliki variabilitas yang tinggi. Menurut Stevens (1992) dalam Patrick (2007), data dengan variabilitas yang tinggi harus ditransformasi atau dieliminasi. Ada beberapa metode dalam mentransformasi data, seperti akar kuadrat dan natural logaritma. Dengan demikian, dalam penelitian ini total aset diubah dalam bentuk natural logaritma total aset.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan

asli daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka Pemerintah daerah cenderung untuk berusaha memenuhi pengungkapan pada LKPD karena tuntutan terhadap transparansi atas pengungkapan pelaporan keuangan semakin tinggi.

Dalam mengukur rasio kemandirian keuangan daerah Halim (2011) memformulasikan pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman. Lesmana (2010) juga menggunakan proksi dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dan kewajiban. Sejalan dengan penelitian Lesmana (2010), dalam penelitian ini juga membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer dan total kewajiban.

Human Development Index (HDI)

Human Development Index (HDI) merepresentasikan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Nilai HDI merupakan hasil perhitungan dari kombinasi atas beberapa unsur, yaitu :

1. Angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan;
2. Angka melek huruf, rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan
3. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (UNDP, 1996).

Dalam penelitian ini, Variabel HDI ditransformasikan menjadi Log Natural HDI ($\ln HDI$) berdasarkan dua pertimbangan yaitu satuan variabel HDI (*indeks*) yang berbeda dengan

variabel lain (%) dan tingginya nilai HDI dibandingkan nilai variabel lain.

Status Daerah

Status daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan skor, dengan ketentuan, jika status daerah adalah kabupaten maka diberi skor 1 dan jika status daerah adalah kota maka diberi skor 2 dengan alasan status kota penduduknya memiliki kontrol social yang tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di daerah kabupaten.

Pengembangan Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji faktor-faktor dari karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan social pada kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Tengah tahun 2012. Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari *legislature size*, ukuran pemerintah daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, HDI (*Human Development Index*), dan Umur administratif Pemerintah Daerah.

Lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna dan Murni, 2007). Winarna dan Murni (2007) menyatakan bahwa lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui adanya pengawasan.

Giligan dan Matsusaka (2001) menemukan bahwa ada pengaruh positif *legislature size* terhadap kebijakan pendapatan dan pengeluaran suatu Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, semakin banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan semakin dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga adanya peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Arcay dan Vazques (2005) menemukan bahwa *size* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan publik di Spanyol. Patrick (2007) menemukan bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penerapan sebuah inovasi baru. Dalam sektor pemerintahan, Sumarjo (2010) juga menemukan bahwa ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, meski pengaruh tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, Lesmana (2010) menemukan bahwa ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pada Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Semakin besar ukuran Pemerintah Daerah maka kinerja keuangan diharapkan akan semakin bagus. Salah satu perwujudan akuntabilitas adalah pelaporan kinerja organisasi melalui laporan keuangan (Mahmudi, 2007 dalam Sumarjo 2010). Dengan begitu diharapkan bahwa semakin baik kinerja suatu Pemerintah Daerah diimbangi dengan pelaporan keuangan yang baik, termasuk melakukan pengungkapan rincian atas Belanja Operasional.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian keuangan

Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Lesmana (2010) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka Pemerintah Daerah cenderung untuk berusaha melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau juga disebut *Human Development Index* (HDI) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia untuk dapat hidup berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi (UNDP, 2004). IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996). Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia perlu memperhatikan empat hal pokok, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1996:12).

Penelitian ini menggunakan variabel status daerah yang nantinya membedakan antara Kota dan kabupaten. Masyarakat Kota memiliki kontrol sosial yang lebih kuat (Abdullah, 2004). Dengan adanya kontrol sosial tersebut, tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbukaan (Herminingsih, 2009) dalam Suhardjanto *et all*, 2010. Dengan

kontrol sosial tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Kota, maka semakin meningkatkan pengawasan mereka pada jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan tersebut pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk jadi lebih baik. Perbedaan karakteristik antara masyarakat Kota dan Kabupaten inilah yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H1a: Ukuran Dewan berpengaruh positif terhadap Belanja Pegawai.

H2a : Ukuran Pemerintah Daerah (Size) berpengaruh positif terhadap Belanja Pegawai.

H3a: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Pegawai.

H4a: *Human Development Index* (HDI) berpengaruh positif terhadap Belanja Pegawai.

H1b : Ukuran Dewan berpengaruh positif terhadap Belanja Barang.

H2b : Ukuran Pemerintah Daerah (Size) berpengaruh positif terhadap Belanja Barang.

H3b : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Barang .

H4b: *Human Development Index* (HDI) berpengaruh positif terhadap Belanja Barang.

H1c : Ukuran Dewan berpengaruh positif terhadap Belanja Hibah.

H2c: Ukuran Pemerintah daerah (Size) berpengaruh positif terhadap Belanja Hibah.

- H3c : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Hibah.
- H4c : *Human Development Index (HDI)* berpengaruh positif terhadap Belanja Hibah .
- H1d : Ukuran Dewan berpengaruh positif terhadap Belanja Bansos.
- H2d: Ukuran Pemerintah daerah(Size) berpengaruh positif terhadap Belanja Bansos.
- H3d : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Bansos
- H4d : *Human Development Index (HDI)* berpengaruh positif terhadap Belanja Bantuan Sosial

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2012 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Total Populasi adalah 514 kabupaten/kota dibawah 34 propinsi (bpk.go.id).

Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006). Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 35 pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012. Pengambilan sampel yang terpilih berjumlah 35 pemerintah daerah karena dalam analisis regresi berganda ukuran sampel hendaknya minimal sepuluh kali variabel independen dalam penelitian (Sekaran, 2006).

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi, yaitu metode Penelitian ini menggunakan empat

variabel dependen yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Lima variabel menjadi variabel independen, yaitu *Legislature, Size*, Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, *HDI (Human Development Index)*. Variabel-variabel tersebut untuk selanjutnya akan diuji secara sistematis.

Dalam model penelitian ini penulis menambahkan variabel kontrol yaitu StatusPemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel Terikat dan Variabel Bebas, ditambah dengan variabel kontrol.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda (*multiple regression model*), karena terdiri dari variabel dependen dan variabel independen (Sekaran, 2006). Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini digunakan enam persamaan regresi sebagai berikut:

$$BP = \alpha + \beta_1 ULEG + \beta_2 SIZE + \beta_3 RMK + \beta_4 HDI + \beta_5 STATUS + e$$

$$BB = \alpha + \beta_1 ULEG + \beta_2 SIZE + \beta_3 RMK + \beta_4 HDI + \beta_5 STATUS + e$$

$$BH = \alpha + \beta_1 ULEG + \beta_2 SIZE + \beta_3 RMK + \beta_4 HDI + \beta_5 STATUS + e$$

$$BBS = \alpha + \beta_1 ULEG + \beta_2 SIZE + \beta_3 RMK + \beta_4 HDI + \beta_5 STATUS + e$$

Keterangan

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi

BP = Belanja Pegawai

BB = Belanja Barang

BH = Belanja Hibah

BBS = Belanja Bantuan Sosial

ULEG = Ukuran Legislatif

SIZE = *Ukuran Pemerintah*

Daerah

RMK = Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah

HDI = *Human Development Index*

STATUS = Status

Pemerintah Daerah

Sebelum masuk keregresi linier berganda, data harus diuji asumsi klasik terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar memenuhi syarat. Perhitungan analisis data seluruhnya dibantu dengan menggunakan teknologi komputer dan perangkat lunak SPSS 21 for Windows. Tahap-tahap pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing-masing dijelaskan sebagai berikut: (a) Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal sebagai syarat dalam model regresi. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan alat uji *Kolmogorov-Smirnov* terhadap data residual regresi dan dilakukan dengan program SPSS 17.0 *for windows.*; (b) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Deteksi adanya multikolinieritas adalah besaran VIF (*Variance Inflation Factor*), jika nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,01$ maka dalam model regresi berganda tidak terjadi multikolinieritas. (c) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji ada gejala autokorelasi dalam model regresi dalam penelitian ini digunakan uji *Durbin-Watson (DW)*; (d) Uji Heteroskedastisitas Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam persamaan regresi digunakan metode grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED* dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh laporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah pada tahun anggaran 2012 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara *judgement sampling* yang berarti sampel merupakan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

Analisis Deskriptif

Adapun hasil statistik deskriptif yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Diskripsi Data Penelitian

	Minimum	Maximum	Mean
Rasio Kemandirian	5.658	16.340	10.4379
HDI	263.75	276.00	268.8689
DPR	25.00	50.00	43.1429
SIZE	56232384 5006.00	253367614 8799.00	123679398 9917.2634

Tabel 1 di atas menunjukkan Rasio kemandirian mempunyai nilai minimum sebesar 5,658% pada kabupaten Banyumas yang menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas belum mandiri masih menggantungkan bantuan dari pusat, nilai maksimum sebesar 16,340% pada kota Surakarta hal ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta sudah baik dalam mengelola keuangan daerah dan nilai rata-rata rasio kemandirian

Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar 10,438%.

Rasio HDI nilai minimum sebesar 263,75 pada daerah Kabupaten Klaten, nilai maksimum sebesar 276,00 dimiliki oleh Kota Pekalongan. dan nilai rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Kota Jawa Tengah sebesar 268,869. Nilai minimum *Legislature Size* (ukuran legislatif) sebesar 25 dimiliki oleh Kota Salatiga, nilai maksimum sebesar 50 dimiliki oleh Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pati, sedangkan nilai rata-rata *Legislature Size* Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar 43.

Nilai minimum size yang diproksi dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 562.323.845.006,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Salatiga, nilai Size maksimum sebesar Rp 2.533.676.148.799.00,- yang dimiliki oleh Kota Semarang hal ini menunjukkan bahwa kota Semarang memiliki ukuran terbesar dan nilai rata-rata size atau pendapatan daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar Rp. 1.236.793.989.917,26,-

Pengujian Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah syarat untuk dapat menggunakan model regresi dan dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas data.

Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Uji Normalitas

Unstandardized Residual	Asym. Sig.	Keterangan
Regresi 1	0,625	Normal
Regresi 2	0,976	Normal
Regresi 3	0,158	Normal
Regresi 4	0,951	Normal

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa nilai residual mempunyai nilai *asym. Sig Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 5% yang berarti bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Hasil pengujian asumsi multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *Tolerance* berikut ini:

Tabel 3
Uji Multikolineaitas

Variabel	Tolerance	VIF
Rasio Kemandirian	0,873	1,146
Human Development Index	0,409	2,447
Ukuran Legislatif	0,426	2,346
Size	0,729	1,372
Status	0,273	3,663

Tabel 3, padaperhitungan *collinearity* menunjukkan bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel *independent* memiliki nilai <10 dan nilai *tolerance*>0,01, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel *independent* pada persamaan regresi.

Uji Autokorelasi.

Adapun hasil uji *Runs Test* dapat dilihat pada tabel berikut:

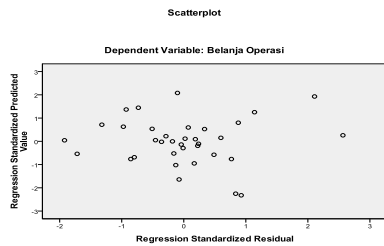
Tabel 4
Uji Autokorelasi

Unstandardized Residual	Asym. Sig.	Keterangan
Regresi 1	0,489	Tidak terjadi Autokorelasi
Regresi 2	0,735	Tidak terjadi Autokorelasi
Regresi 3	1,000	Tidak terjadi Autokorelasi
Regresi 4	0,168	Tidak terjadi Autokorelasi

Hasil uji *runs test* pada table 4 menunjukkan nilai signifikansi lebih besar 5% hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negative pada persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:



Hasil uji heteroskedastisitas pada lampiran menunjukkan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak tetap atau menyebar tidak berpola, yang mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
Belanja Pegawai	Rasio Kemandirian	-0.004	-0.472	0.640
	Human Development Index	-0.005	-0.507	0.616
	Ukuran Legislatif	-0.001	-0.300	0.766
	Size	0.980	13.945	0.000
	Status	-0.100	-1.074	0.291
Belanja Barang	Rasio Kemandirian	-0.018	-0.694	0.493
	Human Development Index	0.015	0.468	0.644
	Ukuran Legislatif	0.019	1.283	0.209
	Size	0.865	3.739	0.001
	Status	0.509	1.658	0.108
Belanja Hibah	Rasio Kemandirian	0.105	2.032	0.051
	Human Development Index	-0.127	-2.013	0.054
	Ukuran Legislatif	0.040	1.412	0.169
	Size	0.733	1.615	0.117
	Status	0.703	1.166	0.253
Belanja Bantuan Sosial	Rasio Kemandirian	-0.059	-0.868	0.392
	Human Development Index	0.149	1.740	0.092
	Ukuran Legislatif	-0.074	-1.954	0.060
	Size	0.935	1.555	0.131
	Status	-3.301	-4.139	0.000

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) Pada Persamaan Regresi 1

Pada persamaan regresi 1 dihasilkan bahwa hanya ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap belanja pegawai yaitu size atau ukuran pemerintah daerah. Sedangkan rasio

kemandirian, ukuran dewan, *Human Development Index* (HDI) dan status daerah tidak signifikan terhadap belanja pegawai.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) Pada Persamaan Regresi 2

Persamaan regresi 2 terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap belanja barang yaitu variabel size, sedangkan rasio kemandirian, ukuran dewan, *Human Development Index* (HDI) dan status daerah tidak signifikan terhadap belanja barang.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) Pada Persamaan Regresi 3

Persamaan regresi 3 menghasilkan bahwa variabel Rasio Kemandirian *Human Development Index*, *Ukuran Legislatif*, *Size* dan Status tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja hibah.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) Pada Persamaan Regresi 4

Persamaan regresi 4 menghasilkan bahwa hanya variabel status daerah yang berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial sedangkan Rasio Kemandirian *Human Development Index*, *Ukuran Legislatif* dan *Size* tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F adalah untuk mengetahui apakah variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen, atau untuk menentukan *good of fit test* atau uji kelayakan model regresi dalam melakukan analisis regresi. Apabila tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5% maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat

atau model layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian ini dan sebaliknya. Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Analisis Uji F

Model	Nilai F	Sig.	Keterangan
Regresi 1	62,219	0,000	Layak (Fit)
Regresi 2	3,786	0,009	Layak (Fit)
Regresi 3	4,096	0,006	Layak (Fit)
Regresi 4	6,527	0,000	Layak (Fit)

Hasil pengujian secara simultan pada menunjukkan bahwa nilai F hitung pada kelima persamaan tersebut di atas mempunyai signifikansi kurang dari 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel variabel Ukuran Legislatif, Size, Rasio Kemandirian, HDI(*Human Development Index*) dan Status Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap terhadap Belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Maksud Pengujian koefisien determinasi adalah untuk mengetahui tingkat kepastian yang paling baik dalam analisis regresi yang dinyatakan dengan koefisien determinasi majemuk (R^2). Adapun hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Koefisien Determinasi

Regresi	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,956	0,915	0,900
2	0,628	0,395	0,291
3	0,643	0,414	0,313
4	0,728	0,530	0,448

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa dengan *adjusted R²* pada persamaan regresi 1 Nilai *adjusted R²* sebesar 0,900 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 90,00% variasi dari Belanja pegawai dapat diterangkan oleh variabel Uleg (Ukuran Legislatif, Size, Ukuran Kemandirian Mandiri, HDI(*Human Development Index*) dan Status, sedangkan 10,00% diterangkan oleh variabel lain yang tidak

dimasukkan dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian.

Nilai *adjusted R²* pada persamaan regresi 2 sebesar 0,291 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 29,10 % variasi dari Belanja barang dapat diterangkan oleh variabel Uleg (Ukuran Legislatif, Size, Ukuran Kemandirian Mandiri, HDI(*Human Development Index*) dan Status, sedangkan 70,90% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian.

Nilai *adjusted R²* pada persamaan regresi 3 sebesar 0,313 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 31,30 % variasi dari Belanja Hibah dapat diterangkan oleh variabel Uleg (Ukuran Legislatif, Size, Rasio Kemandirian Daerah, HDI(*Human Development Index*) dan Status, sedangkan 68,70% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian.

Nilai *adjusted R²* pada persamaan regresi 4 sebesar 0,448 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 44,80 % variasi dari Belanja Bansos dapat diterangkan oleh variabel Uleg (Ukuran Legislatif, Size, Rasio Kemandirian Daerah, HDI(*Human Development Index*) dan Status, sedangkan 59,20% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel size secara individu berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai.
2. Variabel rasio kemandirian, ukuran dewan, HDI dan status daerah secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap

- belanja pegawai.
3. Variabel size secara individu berpengaruh terhadap belanja barang.
 4. Variabel rasio kemandirian, ukuran dewan, HDI dan status daerah secara individu tidak berpengaruh terhadap belanja barang.
 5. Variabel Rasio Kemandirian, HDI, Ukuran Legislatif, Size dan Status secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja hibah.
 6. Variabel status daerah secara individu berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial
 7. Rasio Kemandirian, HDI, Ukuran Legislatif dan Size secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial.
 8. Rasio Kemandirian, *Human Development Index*, Ukuran Legislatif, Size dan Status secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcay, R.B., & Vázquez, F.M. (2005). *Corporate Characteristics, Governance Rules and the Extent of Voluntary Disclosure in Spain*. *Advances in Accounting*. Vol. 21: 299-331.
- Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan di Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Baber, William R, Gore, Angela K, Rich, Kevin T and Zhang, Jean X. 2010. *An Empirical Investigation of Accounting Restatements and Governance in the Municipal Context*. Working Paper Series. SSRN August.
- Damanpour, F. 1991. Organizational innovation: A meta-Analysis of effects of determinants and moderators. *Academy of Management Journal*, Vol. 34: 555-590
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19, Edisi Kelima*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Giligan, Thomas W. & Matsusaka J. G. (2001). *Fiscal Policy, Legislature Size and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century*. *National Tax Journal*. Vol 54: 57-82
- Halim, Abdul & Theresia Damayanti. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. 2011.
- Hasibuan, Abdul Nasser. 2009. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia*. Tesis Universitas Sumatera Utara di Publikasikan. <http://www.tribunnews.com/tag/jawa-tengah/?url=regional/2013/04/08/73-persen-apbd-jawa-tengah-habis-untuk-belanja-pegawai>.
- Indriantoro, Nur Dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2002.

- Lesmana, Sigit I. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ke-2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2005. *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah* Andi. Yogyakarta.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph. D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States–Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from *Accounting & Tax Periodicals*. (Publication No. AAT 3266180)
- Prayitno, Hadi. 2012. *Birokrasi Tambun; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai*. Seknas FITRA. <http://seknasfitra.org/pressrelease/birokrasi-tambun-291-daerah-habiskan-separuh-lebih-apbd-untuk-belanja-pegawai/>. (Diakses 2 November 2014).
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: “Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Kota di Indonesia)*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8 No. 1, 1-94*.
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- UNDP. 1996. *Human Development Report*. Oxford University Press. New York

- UNDP. 2004. *Human Development Report*. United Nations Development Programme. New York
- Winarna, J and Murni, S. (2007). *Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Study Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- www.bpk.go.id, data LKPD dan jumlah Kabupaten, dan Kota di Propinsi Jawa Tengah.